

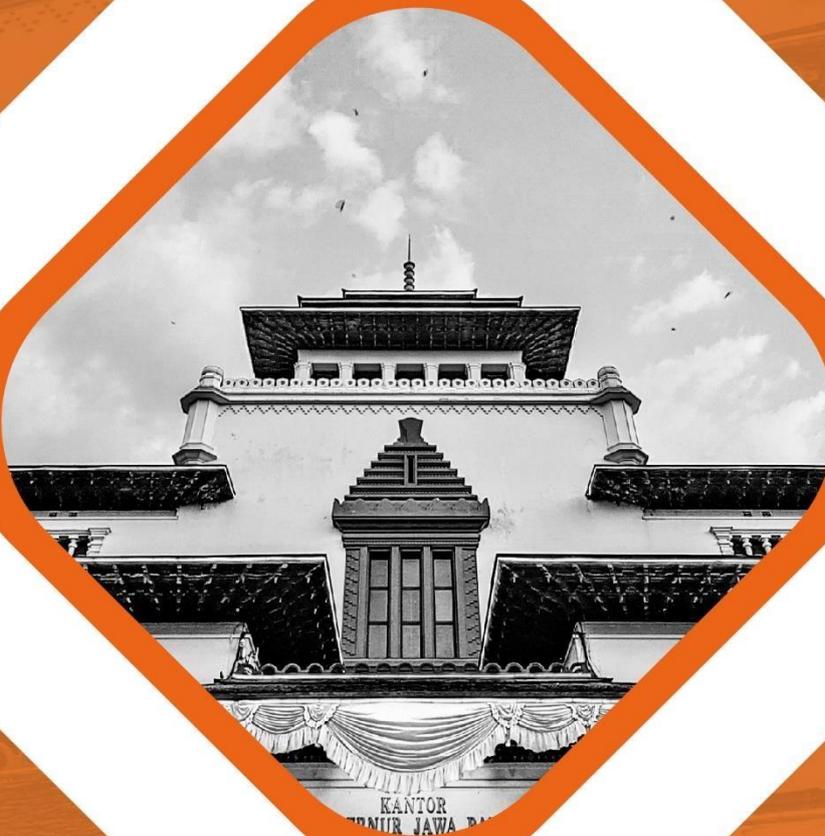


RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

2024 - 2026



Executive Summary

BAB 2

CORE BUSINESS:

1. Perumusan kebijakan umum daerah Provinsi Jawa Barat
2. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

BAB 2

EVALUASI KINERJA

Capaian kinerja:

Rata-rata capaian kinerja fisik 103,5%
Rata-rata capaian kinerja anggaran: 93,11%

Permasalahan:

1. Kebijakan Pemda Prov Jabar belum unggul
2. Budaya kinerja baik belum merata
3. Penataan organisasi belum efektif
4. Mekanisme kerja belum efektif meningkatkan performa instansi
5. Pengelolaan barang/jasa belum optimal
6. Akuntabilitas kinerja belum optimal
7. Kualitas pelayanan publik masih harus ditingkatkan

BAB 3

ISU STRATEGIS

Internasional

SDGs: Kelembagaan yang tangguh

Nasional

Infrastruktur birokrasi yang solis dan kokoh

Pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif

Provinsi

Peningkatan demokrasi dan RB

Setda

Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

BAB 4

TUJUAN:

Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah (Indeks RB)

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya praktik baik reformasi birokrasi (Nilai RB General)

BAB 5

STRATEGI:

1. Mewujudkan agile organization
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Mewujudkan transformasi birokrasi
5. Meningkatkan kualitas kebijakan
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang dan jasa
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Setda

BAB 4

CASCADING KINERJA:

33 INTERMEDIATE OUTCOME
83 IMMEDIATE OUTCOME
124 OUTPUT

BAB 6

PROGRAM KEGIATAN:

8 PROGRAM
28 KEGIATAN
82 SUB KEGIATAN (49 CORE 33 SUPPORT)

INDIKASI ANGGARAN:

2024 : Rp. 811.866.294.390,50
2025 : Rp. 811.318.694.446,75
2026 : Rp. 862.759.215.076,52

Kata Pengantar

Rencana strategis merupakan sebuah panduan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang sebuah organisasi. Menghadapi era VUCA yang kompleks dan masa transisi pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, *team of team* perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat bersama-sama berupaya merancang strategi pembangunan secara teknokratis yang efektif dan efisien.

Masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas membutuhkan respons yang cepat dan adaptif. Organisasi Sekretariat Daerah yang *agile* dengan *team of team* yang tangguh dan inovatif akan mampu memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang muncul.

Dalam dokumen Rencana Strategis ini, telah dirancang langkah-langkah strategis, juga dijabarkan sasaran dan tujuan jangka menengah organisasi agar Sekretariat Daerah memiliki arah yang jelas dalam merumuskan kebijakan. Dokumen ini juga disusun selaras dengan tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Tim telah melakukan analisis terhadap perubahan lingkungan, serta tuntutan dan harapan *stakeholders*, untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Berdasarkan analisis tersebut, telah ditentukan sasaran strategis hingga indikator yang spesifik dan terukur, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai target strategis Sekretariat Daerah pada Tahun 2026.

Dokumen Rencana Strategis ini akan menjadi panduan bagi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang tepat dan efektif selama 3 tahun mendatang. Dalam dokumen ini juga tergambar komitmen Sekretariat Daerah dalam mengembangkan organisasi agar dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang semakin dinamis dan kompleks.

Terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dalam menyusun dokumen ini, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses ini.

Bandung, 30 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng

DAFTAR ISI

Executive Summary	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	v
Daftar Diagram	v
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	8
2.2. Sumber Daya	12
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	15
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	22
BAB III. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	24
3.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	24
3.2. Isu Strategis Sekretariat Daerah	34
BAB IV. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	38
4.2. Cascading Kinerja Sekretariat Daerah	39
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan	41
BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	43
BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Pada Sekretariat Daerah	60
BAB VIII. Penutup	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2019-2022	19
Tabel 2.2.	Kelompok Sasaran Layanan	22
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	33
Tabel 3.2.	Isu Strategis Sekretariat Daerah	36
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026	39
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah 2024-2026	41
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan	44
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang pada Sekretariat Daerah	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	8
Gambar 2.2.	Core Business Sekretariat Daerah	10
Gambar 2.3.	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah	13
Gambar 2.4.	Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	14
Gambar 2.5.	Jenis Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	14
Gambar 4.1	Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026	40

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1.	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019-2022	18
Diagram 3.1.	Realisasi Capaian Kualitas Kebijakan terhadap Bobot Tahun 2021	25
Diagram 3.2.	Realisasi ITKP terhadap Bobot Tahun 2021 dan 2022	27
Diagram 3.3.	Kepatuhan PD dalam Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan	28
Diagram 3.4.	Upaya Harmonisasi Kebijakan	28
Diagram 3.5.	Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2021 dengan Bobot per Komponen	29
Diagram 3.6.	Rata-rata Pertumbuhan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dalam 3 Tahun Terakhir	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlaku saat ini, periode Tahun 2018-2023, akan segera berakhir. Berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah disusun untuk periode lima tahun. Apabila mengikuti siklus perencanaan jangka menengah, perangkat daerah semestinya harus menyusun Renstra periode 5 tahun berikutnya. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat memasuki periode transisi. Masa transisi ini dimulai dari berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2023 hingga ditetapkannya Gubernur baru yang definitif. Menurut Inmendagri tersebut, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2023 harus menyusun dokumen perencanaan daerah periode Tahun 2024-2026. Dengan demikian, dokumen perencanaan menengah daerah provinsi dan dokumen Renstra perangkat daerah provinsi disusun hanya untuk periode tiga tahun, yaitu Tahun 2024 – 2026. Periodesasi dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah ini selaras dengan periode perencanaan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah atau dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Sebagaimana halnya RPD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Renstra Sekretariat Daerah

Tahun 2024-2026 ini akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2024-2026.

Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 menyatakan agar dokumen Renstra perangkat daerah sekurangnya memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program/kegiatan/sub kegiatan hingga pendanaan perangkat daerah, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya. Sementara untuk penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. Sedangkan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen Renstra ini dilakukan dengan memperhatikan:

1. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Sekretariat Daerah, melalui evaluasi pencapaian RKPD dan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2022;
2. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
3. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat Daerah;
4. Kebijakan daerah/nasional;
5. Regulasi yang berlaku, dan
6. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekretariat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan serta sebagai penjabaran dari rencana kerja pada tingkat provinsi. Untuk itu,

dokumen ini memiliki ruang lingkup yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan tersebut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai peta jalan perencanaan kinerja sekretariat daerah selama tiga tahun dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian dokumen ini pun

disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Di dalamnya termuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditargetkan untuk dicapai beserta dengan dukungan sumber daya. Maka dari itu, Rencana Strategis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 juga menjadi pedoman dalam:

- a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- c. Menentukan pagu anggaran per tahun;
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- e. Menyusun pelaporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas urgensi penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 serta gambaran umum terkait pokok bahasan yang dimuat

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat risalah tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat uraian tentang maksud dan tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah

Memuat informasi tentang dasar hukum pembentukan, struktur Organisasi, serta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Memuat gambaran ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, aset, anggaran, dan unit usaha yang masih beroperasi

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan sasaran, indikator, dan target kinerja rencana strategis periode sebelumnya

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Menguraikan identifikasi kelompok sasaran layanan atau stakeholder yang mempengaruhi, menerima, dan memperoleh dampak dari kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Isu Strategis Sekretariat Daerah

Berisi isu-isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang diperoleh berdasarkan gambaran pelayanan sekretariat daerah, isu-isu daerah, maupun isu

nasional. Kemudian dikemukakan pula metode penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan hasil telaahan dan fungsi sekretariat dalam mendukung sasaran pembangunan Jawa Barat.

4.2. *Cascading* Kinerja Sekretariat Daerah

Menggambarkan penjenjangan kinerja sekretariat daerah dengan keterkaitannya dengan kinerja Provinsi Jawa Barat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan strategi dan arah kebijakan menengah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja berikut indikasi pendanaan pelaksanaannya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENUNJANG

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mendukung pencapaian kinerja pada level Provinsi. Di dalamnya digambarkan target dan realisasi pada periode perencanaan jangka menengah periode sebelumnya serta proyeksi target pada periode Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

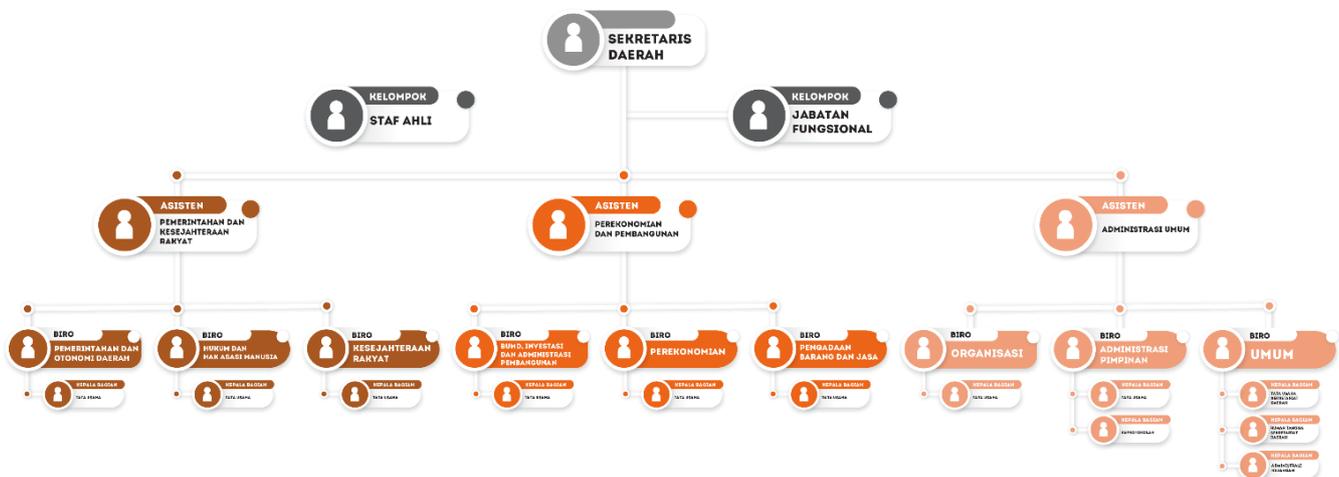
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Setda merupakan unsur staf yang menjalankan fungsi penunjang. Secara struktur, setda dilengkapi dengan empat level struktur organisasi. Semenjak tahun 2019, struktur tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan adanya penyederhanaan birokrasi yang menghilangkan seluruh struktur eselon 4 dan sebagian eselon 3. Sebelumnya, setda memiliki satu Eselon 1, 12 Eselon 2, 27 Eselon 3, dan 81 Eselon 4 kemudian menjadi satu Eselon 1, 12 Eselon 2, dan 12 Eselon 3. Adapun seluruh Eselon 4 dialihjabatankan kepada jabatan fungsional sehingga setda memiliki 81 pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan. Struktur terakhir dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Sumber: Pergub Jabar No. 22 Tahun 2022

Walaupun struktur organisasi setda telah mengalami perubahan dan sistem kerja telah mulai disesuaikan, namun hingga dokumen ini disusun produk hukum yang melandasi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah masih belum ditetapkan. Oleh karena itu, kinerja setda masih berlandaskan kepada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa

Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Di dalam peraturan tersebut tugas pokok setda adalah “merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif”.

Selanjutnya, dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat daerah provinsi mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi oleh perangkat daerah;
- 3) Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
- 4) Penyelenggaraan administrasi sekretariat daerah provinsi;
- 5) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sekretariat daerah provinsi; dan
- 6) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Secara sederhana tugas pokok dan fungsi setda diterjemahkan sebagai memfasilitasi tugas perangkat daerah dalam perumusan kebijakan daerah umum provinsi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Fasilitasi dalam perumusan kebijakan umum daerah termasuk di dalamnya penyusunan produk hukum dan naskah kerjasama, pemastian kualitas substansi kebijakan, pemantauan dampak kebijakan, serta evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan. Sementara itu fasilitasi terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan kelembagaan, pengelolaan regulasi daerah, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antara kedua *core business* tersebut, terjadi interelasi dan integrasi sehingga

keduanya merupakan fungsi yang saling berkaitan dan berkesinambungan.

Gambar 2.2. Core Business Sekretariat Daerah



Kemudian, sebagaimana struktur, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dijabarkan ke dalam tiga asisten dan sembilan biro dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Asisten daerah: merumuskan kebijakan umum daerah, merumuskan kebijakan strategis, melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pada lingkup bidangnya.
2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah: menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama.
3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia: menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang hukum dan hak asasi manusia.

4. Biro Kesejahteraan Rakyat: menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.
5. Biro Perekonomian: menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi bidang perekonomian.
6. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan: menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pembinaan, pengkoordinasian dan evaluasi pelayanan administrasi bidang badan usaha milik daerah, investasi daerah, dan administrasi pembangunan.
7. Biro Pengadaan Barang dan Jasa: menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang pengadaan barang dan jasa.
8. Biro Organisasi: menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang organisasi.
9. Biro Administrasi Pimpinan: menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang administrasi pimpinan.
10. Biro Umum: menyelenggarakan perumusan kebijakan umum serta membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, serta tata usaha.

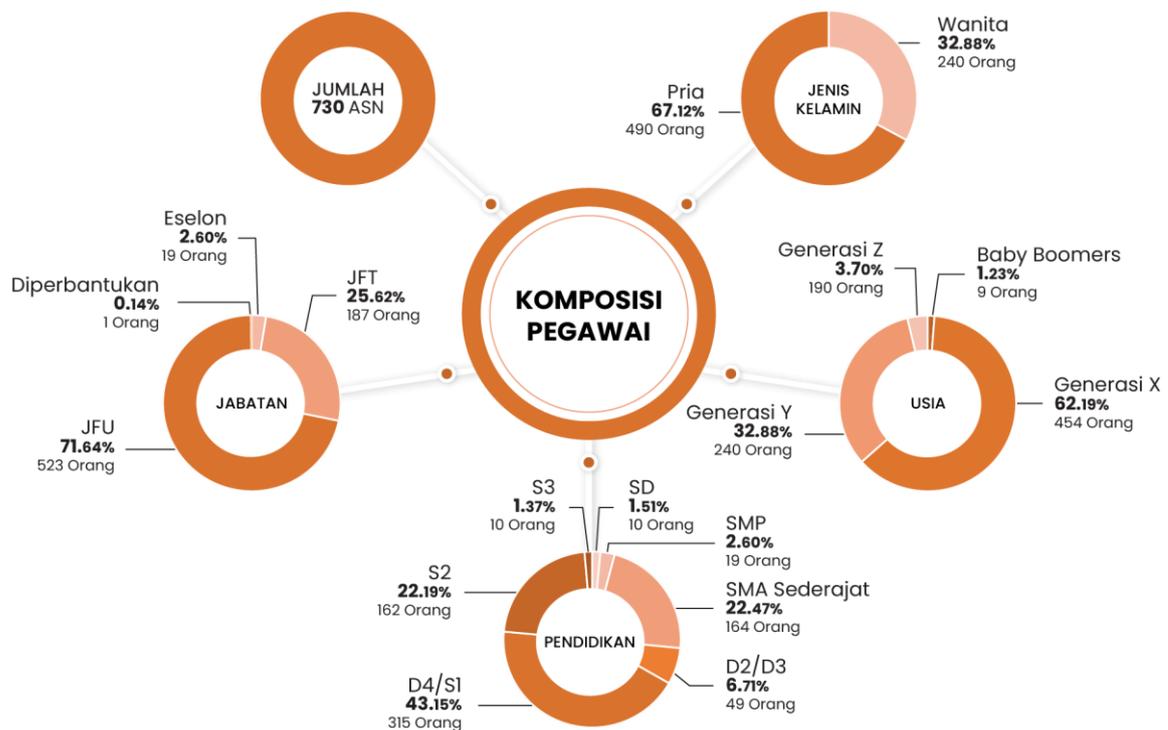
2.2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar dan teknologi canggih namun tidak ada SDM yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pentingnya peran SDM dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi.

Berdasarkan data kepegawaian s.d. bulan Desember 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda Jabar) memiliki pegawai sebanyak 1.264 orang dengan komposisi 702 PNS, 28 CPNS dan 534 Non ASN. Dari sisi kualitas, potensi PNS pada Setda Jabar cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai merupakan Sarjana (36,58%) dan bergolongan ruang III (62,47%). Apabila dilihat dari komposisi usia, mayoritas berada pada rentang usia 41-50 tahun (39,86%). Ketiga komposisi tersebut menggambarkan mayoritas PNS pada Setda Jabar memiliki pendidikan Sarjana atau memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama. Keduanya, memiliki kontribusi positif terhadap ketercapaian kinerja unit organisasi.

Namun demikian, Setda Jabar memiliki komposisi PNS dengan pendidikan D-II & D-III sebanyak 49 pegawai (6,71%). Jumlah tersebut lebih rendah dari pegawai berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 164 pegawai (22,47%). Selain itu, Setda Jabar memiliki Non ASN untuk mendukung kelancaran dan efektivitas kinerja PNS. Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum memiliki jumlah Non PNS yang cukup besar bila dibandingkan dengan Biro yang lain.

Gambar 2.3. Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah

Sumber: Kepegawaian Setda, Desember 2022

b. Sumber Daya Anggaran

Secara umum, selama tiga tahun terakhir, Setda Jabar mampu mengelola rata-rata 94,11% alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selama kurun waktu tahun 2020 s.d. tahun 2022, penetapan alokasi anggaran terus meningkat. Sedangkan dari sisi penggunaan anggaran ada sedikit penurunan persentase capaian di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 capaian penggunaan anggaran sebesar 95,39%, tahun 2021 sebesar 91,50% dan tertinggi pada tahun 2022 dengan capaian 95,45%.

Gambar 2.4.

Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah



Sumber: LKPJ Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2022

c. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana Setda Jabar meliputi tanah, bangunan, alat penyimpan data, logistik, alat keamanan dan alat transportasi. Tanah dan bangunan milik Setda Jabar tidak hanya berlokasi di Gedung Sate, namun juga di lokasi lain yang digunakan sebagai bangunan kantor, rumah negara, rumah dinas, gudang, tempat ibadah, maupun tanah kosong yang dapat dipergunakan oleh publik.

Gambar 2.5.

Jenis Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah



*data per 31 Desember 2022

Di Gedung Sate, penggunaan sarana prasarana gedung Setda Jabar dibagipakaikan. Sebagian gedung dimanfaatkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, UPTD Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Klinik Yankepeg Pemprov Jabar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, serta Saber Pungli. Keberadaan 3 (tiga) unit kerja dan satuan petugas di dalam lingkungan kerja Sekretariat Daerah dilatarbelakangi oleh urgensi koordinasi dengan Pimpinan. Di samping itu, sarana prasarana kantor seperti alat penyimpan data, perlengkapan rumah tangga, serta sarana mobilitas berada dalam kondisi baik dengan jumlah yang cukup bagi seluruh pegawai.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sebagaimana telah disampaikan bahwa *core business* setda adalah pada perumusan kebijakan umum daerah provinsi. Peran ini, pada rencana strategis periode 2018-2023 memberikan kontribusi optimal pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kontribusi peran ini tergambarkan dalam pencapaian kinerja setda yang sangat baik melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan proyeksi tahun 2022 terealisasi pada predikat A.

Penerjemahan peran setda pada periode 2018-2023 dituangkan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis. Pada kurun waktu empat tahun (2019-2022) sasaran setda mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa perubahan pada kebijakan pusat yang berpengaruh terhadap struktur organisasi serta penetapan program dan kegiatan dalam proses perencanaan. Selain itu, perubahan juga dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk lebih mengefektifkan kinerja setda dalam pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat.

Perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Renstra Perubahan 2018-2023 dilakukan di tahun 2021 yang menetapkan enam sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja utama. Perubahan ini merupakan momen dimana setda melakukan *refocusing* kinerja yang lebih menggambarkan *core business*-nya. Secara umum, sasaran strategis mengarah pada dua klasifikasi yaitu pada pemastian kualitas kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta pada pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pada pemastian kualitas kebijakan, sasaran strategis ditetapkan dengan kalimat 'meningkatnya kualitas kebijakan'. Sasaran ini difokuskan pada kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sehingga tolok ukur pencapaiannya diamanatkan kepada tiga biro yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan. Secara teknis, kinerja ketiga biro tersebut adalah untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan dari mulai perencanaan hingga evaluasi dipenuhi dan dipatuhi. Adapun pengukuran didasari pada perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Kemudian, pada pemastian implementasi kebijakan dilakukan dengan menetapkan empat sasaran. Pertama, meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang ditetapkan sebagai dukungan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu 'terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel' dan merupakan penerapan dari kebijakan terkait reformasi birokrasi. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada lima biro yaitu Biro Hukum dan HAM, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Organisasi. Pengukuran yang menjadi tolok ukur pencapaiannya didasarkan pada perhitungan evaluasi penerapan reformasi birokrasi di delapan area perubahan sebagaimana dilakukan oleh KemenPAN & RB.

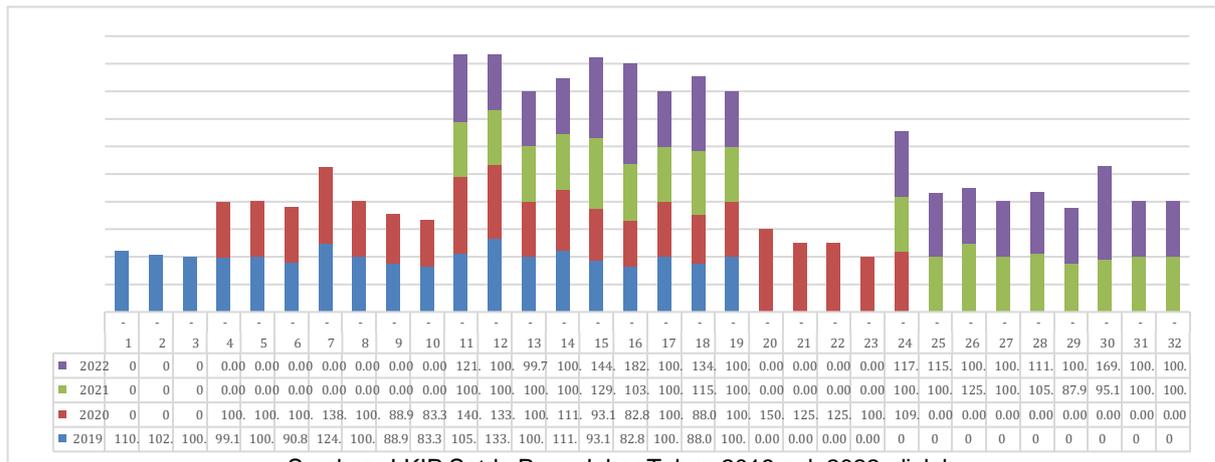
Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pembinaan, pemahaman pengamalan keagamaan yang ditetapkan sebagai dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu 'meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi'. Kinerja ini merupakan implementasi dari kebijakan terkait kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama. Adapun pencapaiannya, diamanatkan hanya kepada Biro Kesejahteraan Rakyat yang mampu fungsi pembinaan bidang keagamaan.

Sasaran ketiga adalah diusulkannya calon daerah otonomi baru yang merupakan kinerja pendukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu 'terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan'. Kinerja ini merupakan implementasi kebijakan pimpinan dalam pemekaran wilayah untuk menjamin terjadinya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Pencapaiannya diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pengukuran didasarkan kepada kebijakan yang mengatur syarat pemekaran wilayah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.

Selanjutnya, sasaran keempat adalah meningkatnya kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kinerja pendukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan 'terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif'. Ini pun merupakan implementasi terhadap kebijakan pimpinan yang menekankan urgensi kolaborasi untuk pembangunan yang efektif dan efisien. Pencapaian sasaran ini diamanatkan hanya kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pengukuran didasarkan kepada kebijakan yang mengatur tentang efektifitas kerjasama daerah.

Terakhir, sasaran ketiga yaitu meningkatnya kualitas layanan sekretariat daerah yang merupakan implementasi dari kebijakan tugas pokok dan fungsi untuk memastikan kinerja setda berjalan secara optimal. Kinerja ini merupakan kinerja pendukung bagi pencapaian sasaran setda yang lainnya. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum dengan pengukuran melalui survey kepuasan.

Meski mengalami beberapa kali perubahan, namun esensi dari kinerja setda tidak pernah berubah yaitu pelayanan terhadap perangkat daerah dalam perumusan kebijakan. Baik itu dalam bentuk layanan administrasi, pendampingan, pengendalian, maupun fasilitasi koordinasi. Lalu, secara rata-rata kinerja setda dalam empat tahun terakhir menunjukkan kondisi yang memuaskan dengan capaian sebesar 103,5%.

Diagram 2.1. Capaian Indikator Kinerja Setda Prov Jabar Tahun 2019-2022


Sumber: LKIP Setda Prov. Jabar Tahun 2019 s.d. 2022, diolah.

***) Keterangan: Nomor indikator kinerja utama sebagaimana urutan pada Tabel 2.1.**

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2019-2022

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target					Realisasi					Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang Ditindaklanjuti	Persen	90.5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat
2	Persentase Produk Perundang-undangan yang dibentuk dan disebarluaskan serta implementasi HAM	Persen	100	N/A	N/A	N/A	N/A	102.96	N/A	N/A	N/A	N/A	Biro Hukum dan HAM
3	Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Biro Humas dan Protokol
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	69,1-69,5	68,1-68,5	N/A	N/A	N/A	68.5	68.5	N/A	N/A	N/A	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
5	Level Kematangan/Maturitas PBJ	Level	2	3	N/A	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6	Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi Daerah yang Ditindaklanjuti	Persen	90	90	N/A	N/A	N/A	81.73	90	N/A	N/A	N/A	Biro BUMD dan Investasi
7	Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	124.24	138.46	N/A	N/A	N/A	Biro Perekonomian
8	Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kualifikasi	Informatif	Informatif	N/A	N/A	N/A	Informatif	Informatif	N/A	N/A	N/A	Biro Humas dan Protokol
9	Nilai Penguatan Organisasi	Nilai	2.08	2.08	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85	N/A	N/A	N/A	Biro Organisasi
10	Nilai Penataan Organisasi	Nilai	2.22	2.22	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85	N/A	N/A	N/A	Biro Organisasi
11	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Persen	75	60	80	80	85	78.91	84.12	80	97.55		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
12	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Persen	75	75	100	100	100	100	100	100	100		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
13	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Nilai	3.34	3.309	3.329	3.344	3.354	3.34	3.309	3.33	3.344*		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target					Realisasi					Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
14	Persentase Fasilitas Administrasi Pemerintahan Umum	Persen	90	90	90	90	90	100	100	90	90		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
15	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4.10	4.10	4.06	4.18	4.30	3.82	3.82	5.26	6.23*		Biro Organisasi
16	Nilai Penataan Tata Laksana	Nilai	3.62	3.62	3.20	3.30	3.40	3.00	3.00	3.31	6.2*		Biro Organisasi
17	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A*		Biro Organisasi
18	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3.69	3.69	3.45	3.55	3.65	3.25	3.25	3.97	4.92*		Biro Organisasi
19	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Keprotokolan	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik		Biro Administrasi Pimpinan
20	Jumlah Usulan Persiapan Daerah Otonom yang Disetujui DPRD Provinsi	Kab/Kota	N/A	1	1	2	2	N/A	3	2	3	1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
21	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan Sosial yang Ditindaklanjuti*	Persen	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
22	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Produk Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan HAM serta Dokumentasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Persen	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	Biro Hukum dan HAM
23	Persentase Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah	Kualifikasi*	N/A	Baik*	N/A	N/A	N/A	N/A	Baik*	N/A	N/A	N/A	Biro Umum
24	Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Persen	N/A	91	80	85	90	N/A	100	80	100		Biro Kesejahteraan Rakyat
25	Persentase Bahan Kebijakan Umum lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	80	85	90	N/A	N/A	80	98		Biro Kesejahteraan Rakyat
26	Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemenuhan HAM	Persen	N/A	N/A	80	100	100	N/A	N/A	100	100		Biro Hukum dan HAM
27	Persentase penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persen	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100		Biro Perekonomian

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target					Realisasi					Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
28	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian dalam aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	90	90	90	N/A	N/A	95.25	100		Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
29	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Nilai	N/A	N/A	70	80	90	N/A	N/A	61.57	80.2		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
30	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	3.94	4.06	4.18	N/A	N/A	3.75	7.09*		Biro Organisasi
31	Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan	Predikat	N/A	N/A	Baik	Baik	Baik	N/A	N/A	Baik	Sangat Baik		Biro Administrasi Pimpinan
32	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda	Kategori	N/A	N/A	B	B	B	N/A	N/A	B	A		Biro Umum

Sumber: Renstra Setda Prov Jabar Tahun 2018-2023, Renstra Setda Prov Jabar Perubahan Tahun 2018-2023, LKIP Setda Prov Jabar Tahun 2019 s.d. 2022, diolah.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Secara sederhana, stakeholder adalah semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas. dalam terjemahan bahasa Indonesia sendiri, arti stakeholder adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi, berikut ini adalah kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat:

Tabel 2.2. Kelompok Sasaran Layanan

No	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	Uraian Pelayanan	Kelompok Sasaran Layanan
1	Perumusan Kebijakan Daerah Umum Provinsi	Fasilitasi Tugas Perangkat Daerah Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Umum Provinsi	Perangkat Daerah
		Perumusan Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual	Lembaga dan Organisasi Masyarakat Keagamaan
		Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat
2	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitasi Pengembangan Organisasi	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Pemerintahan	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Otonomi Daerah	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota,

No	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	Uraian Pelayanan	Kelompok Sasaran Layanan
		Fasilitasi Kerjasama	Perangkat Daerah
		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi BLUD	Perangkat Daerah
3	Pelayanan Internal	Fasilitasi Dan Pelayanan Administrasi Pimpinan	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Sekretaris Daerah
		Fasilitasi Urusan Bidang Umum	Internal Sekretariat Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja setda dalam empat tahun terakhir secara rata-rata memuaskan dengan capaian sebesar 107,20%. Hal ini, pada satu sisi, memperlihatkan bahwa setda dapat menangani segala permasalahan yang ditemui. Namun demikian, identifikasi tetap perlu dilakukan terutama dalam pelaksanaan fungsi pada *core business* setda.

Pengidentifikasian permasalahan pelayanan setda dilakukan dengan mengulas kondisi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan sebagaimana upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat sebagaimana norma yang telah ditetapkan. Tentunya hasil yang telah dicapai dipengaruhi oleh baik faktor eksternal maupun internal.

a. Permasalahan Pelayanan dalam Fungsi Perumusan Kebijakan

Di dalam pelaksanaan fungsi 'perumusan kebijakan' dengan sasaran adanya peningkatan kualitas kebijakan, permasalahan yang ditemui berkaitan dengan proses perumusan kebijakan itu sendiri. Berdasarkan penilaian terhadap kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, terdapat empat komponen dalam siklus kebijakan yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Adapun hasil penilaian LAN pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Tahun 2021 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan berada dalam kategori 'Cukup' atau pada nilai 50,01.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi, perumusan kebijakan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kurang didukung oleh data yang relevan. Kemudian pelibatan stakeholder dari kelompok di luar pemerintahan belum representatif. Selanjutnya, belum semua kebijakan dilakukan evaluasi serta dampak kemanfaatannya kepada masyarakat.

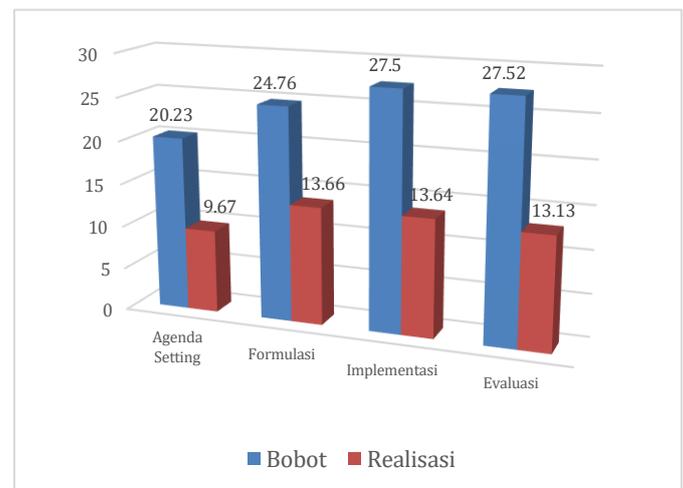
Berkaitan dengan kondisi tersebut, hasil identifikasi pada

setda ditemukan bahwa perumusan kebijakan berhenti di formulasi yang ditandai dengan penetapan produk hukum. Adapun pemantauan terhadap implementasi dan evaluasi terhadap dampak kemanfaatannya tidak dilakukan. Hal ini didorong oleh kurang dalamnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi perumusan kebijakan juga ketiadaan prosedur maupun alat bagi pemantauan dan evaluasi kebijakan.

b. Permasalahan Pelayanan dalam Fungsi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Di dalam pelaksanaan fungsi 'penerapan tata kelola pemerintahan yang baik' beberapa permasalahan yang diperoleh berkaitan dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap enam area perubahan yang berada dalam kewenangan fungsi setda. Enam area tersebut adalah manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, deregulasi kebijakan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Diagram 3.1.
Realisasi Capaian Kualitas Kebijakan terhadap Bobot Tahun 2021



Sumber: LAN RI, 2021, diolah.

1. Area manajemen perubahan

Pada penerapan manajemen perubahan, budaya kinerja yang baik belum merata terjadi pada seluruh perangkat daerah. Hal ini diperlihatkan dari hasil evaluasi penerapan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Tahun 2021 yang pada area ini diperoleh nilai 4,07 poin dari nilai maksimal 5,00 poin. Salah satu pendorongnya adalah penerapan *core value* berAKHLAK baru mencapai 73,12 poin dari total nilai 100 poin dimana baru enam dari 37 perangkat daerah (16%) yang memperoleh kategori baik.

Disamping itu, perubahan birokrasi pun belum terinternalisasi secara menyeluruh. Hal ini diperlihatkan dari baru 81% dari total perangkat daerah termasuk ke dalam unit kerja dengan reformasi birokrasi dalam rentang kategori BB dan

B. Hal ini mengandung arti bahwa reformasi birokrasi diterapkan namun belum memuaskan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya yang telah dilakukan setda dalam menginternalisasi perubahan budaya pada perangkat daerah belum cukup.

2. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Pada area penataan dan penguatan organisasi, penerapan organisasi berbasis kinerja dinilai belum maksimal. Hal ini ditandai oleh hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 dengan nilai perolehan 5,09 poin dari nilai maksimal 7,50 poin. Hasil ini didorong oleh bahwa penentuan struktur organisasi dinilai belum didasarkan pada arsitektur kinerja atau proses bisnis. Kondisi eksisting bahwa arsitektur kinerja telah dapat memperlihatkan adanya ketidaktepatan fungsi pada suatu struktur unit kerja namun tindak lanjut dari penemuan tersebut belum diaplikasikan.

3. Area Penataan Tatalaksana

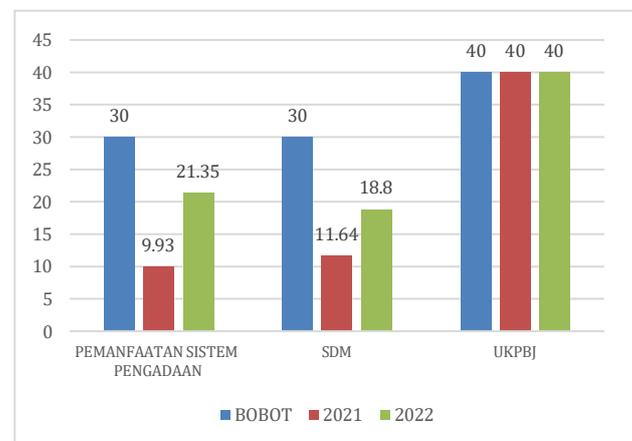
Penataan tatalaksana berkaitan dengan mekanisme kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, penerapannya di

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai belum maksimal ditandai dengan hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 yang memberikan nilai 4,34 dari nilai total 6,25 poin. Penilaian ini didorong oleh belum jelasnya relasi konseptual antara proses bisnis dan pengukuran kinerja. Lalu, keterhubungan antara proses bisnis dan prosedur standar operasional (SOP) juga belum dirumuskan.

Selain daripada itu, untuk mendorong mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien, penggunaan teknologi informasi sangat disarankan. Fokus utama dalam hal ini adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam pengelolaannya. Terkait hal ini, peran setda ada pada pemastian penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat.

Adapun kondisi pengelolaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada pada posisi yang baik. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022 80,20 poin atau berada pada rentang kategori 'Baik'. Hasil ini diperoleh dari evaluasi Lembaga Kebijakan

Diagram 3.2.
Realisasi ITKP terhadap Bobot Tahun 2021 dan 2022

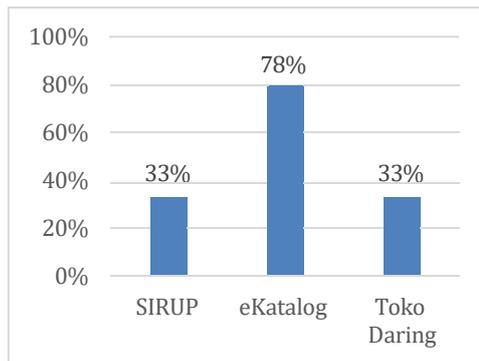


Sumber: LKPP, 2022, diolah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan ITKP ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.

Meski demikian masih diperoleh beberapa permasalahan sehingga kondisi belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Di dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, penggunaan sistem informasi masih belum optimal. Hanya 33% dari seluruh perangkat daerah yang patuh dalam penginputan

Diagram 3.3.
Kepatuhan PD dalam Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan

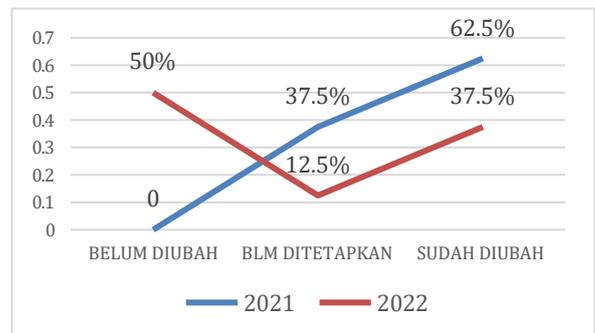


Sumber: Biro PBJ, 2022, diolah

pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Ketidapatuhan terutama terjadi pada kewajiban pelaporan hasil pekerjaan. Disamping itu, penggunaan eKatalog dan toko daring pun masih belum optimal dilakukan oleh seluruh perangkat daerah.

4. Area Deregulasi Kebijakan
Selanjutnya, kinerja belum maksimal juga dinilai terjadi pada area deregulasi kebijakan ditandai dengan hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 sebesar 3,54 poin dari nilai maksimal 5,00 poin. Penilaian ini didorong oleh

Diagram 3.4.
Upaya Harmonisasi Kebijakan



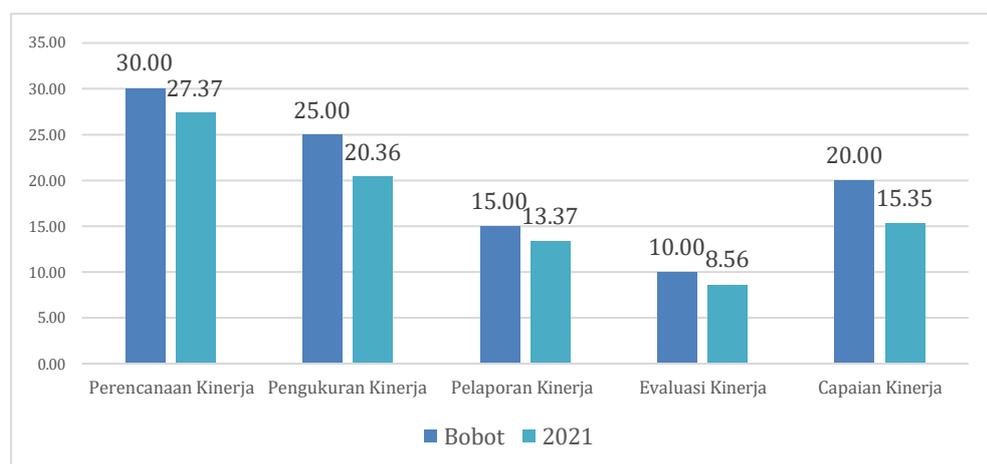
Sumber: Biro Hukum dan HAM, 2022, diolah

belum seluruh kebijakan tercakup dalam peta harmonisasi kebijakan. Selain daripada itu, belum semua produk hukum yang dianalisis memerlukan perubahan, ditetapkan perubahannya. Di Tahun 2021, terdapat 37,5% produk hukum yang teridentifikasi memerlukan perubahan namun belum ditetapkan. Selain daripada itu, permasalahan berkaitan dengan kualitas kebijakan turut berkontribusi terhadap kondisi deregulasi kebijakan ini.

5. Area Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai 'memuaskan' yang diperlihatkan dari hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 dengan nilai 85,01 poin atau kategori A. Perolehan ini sudah baik namun belum sesuai dengan harapan. Beberapa hal yang masih memerlukan optimalisasi adalah tingkat akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain daripada itu, kualitas pelaporan kinerja yang belum informatif belum dapat memberikan dampak signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai target kinerja selanjutnya.

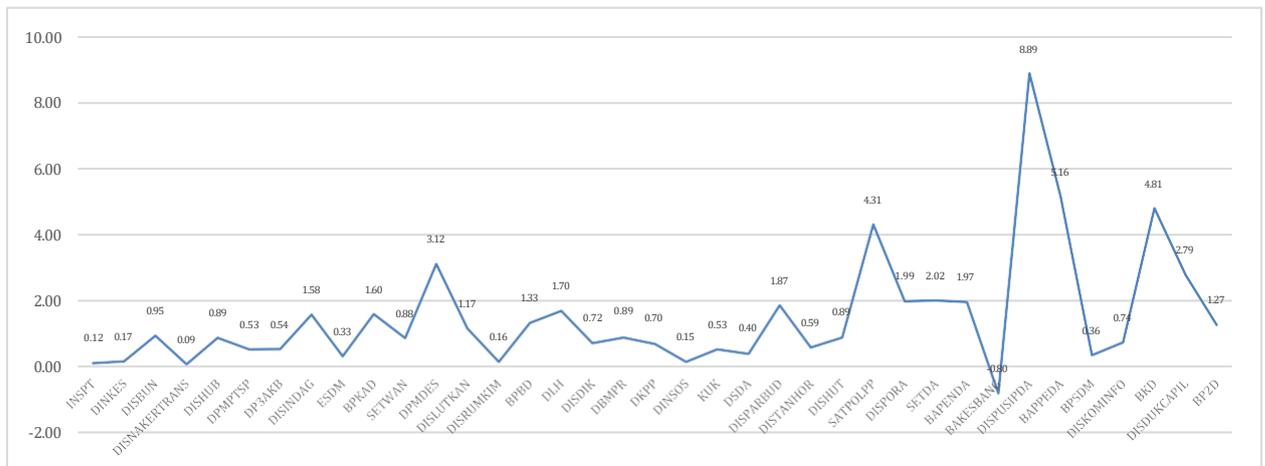
Diagram 3.5.
Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2021 dengan Bobot per Komponen



Sumber: LHE SAKIP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, diolah

Saat ini, seluruh perangkat daerah telah berada pada kategori A dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian, dilihat dari hasil evaluasi, perkembangan intensifitas penerapannya cukup lambat. Dalam kurun tiga tahun terakhir rata-rata perkembangan nilai SAKIP perangkat daerah adalah 1,5% dengan lima perangkat daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan nilai di atas 3%.

Diagram 3.6.
Rata-Rata Pertumbuhan Nilai SAKIP Perangkat Daerah
dalam 3 Tahun Terakhir



Sumber: Biro Organisasi, 2022, diolah.

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan publik dinilai memiliki kualitas tertinggi dengan kategori A. Sehingga pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada dalam zona hijau. Kondisi ini merupakan hasil evaluasi Ombudsman terhadap tiga perangkat daerah yang menjadi sampel yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Namun hasil evaluasi KemenPANRB memperlihatkan bahwa pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum ditingkatkan secara maksimal. Dari data penilaian Tahun 2021, diperoleh nilai 5,08 poin dari total maksimal sebesar 6,25 poin. Adapun beberapa aspek yang dinilai memerlukan peningkatan antara lain adalah pengelolaan pengaduan dan konsultasi serta inovasi pelayanan publik.

c. Permasalahan Internal Setda

Berhasil tidaknya pencapaian target kinerja bergantung kepada lingkungan organisasi terutama lingkungan internal. Oleh

karena itu, fenomena yang terjadi di internal setda tidak dapat diabaikan. Adapun identifikasi permasalahan internal setda diklasifikasikan dalam lima kondisi yaitu struktur, sistem/teknologi, sumber daya manusia, budaya, lingkungan hidup. Kelima kondisi ini diidentifikasi dalam ruang lingkup *core business* pelayanan setda.

1. Struktur

Struktur organisasi setda berbeda dengan unit kerja lain. Dilihat dari eselonering, setda merupakan satu-satunya unit kerja yang dikepalai oleh seorang eselon 1 dan membawahi dua tingkat eselon 2 yaitu Asisten Daerah (2a) dan Kepala Biro (2b) dengan jumlah masing-masing tiga dan sembilan orang. Kondisi ini menyebabkan rentang koordinasi dan kendali cukup panjang dan lebar. Penerapan konsep penyederhanaan birokrasi juga belum dapat diterapkan dengan benar. Walau telah dilakukan sosialisasi mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi, namun belum dapat secara efektif memperpendek rantai koordinasi. Hal ini didorong oleh budaya kerja yang belum adaptif serta ketiadaan legal formal mekanisme kerja yang lebih kuat.

2. Sistem/teknologi

Berkaitan dengan mekanisme kerja pelaksanaan tugas dan fungsi, setda belum memiliki sistem yang berlaku untuk seluruh unit. Saat ini, SOP yang tersedia merupakan prosedur untuk pelayanan sektoral biro termasuk sistem informasi yang mendukung pelayanan tersebut. Hal ini didorong dengan masih melekatnya budaya silo yang melihat setda bukan sebagai satu kesatuan. Sehingga komunikasi terbuka dan *sharing knowledge* belum diterapkan secara optimal.

3. Sumber daya manusia

Dilihat dari komposisi kualifikasi, 66,71% PNS setda bergelar sarjana. Kualifikasi tersebut sinkron dengan karakter tugas dan fungsi setda yang kualitatif. Kemudian, sebanyak 42,83% pegawai setda merupakan non ASN. Berdasarkan Surat

Badan Kepegawaian Daerah nomor 102/KPG.02/PPIK tanggal 18 Januari 2023 bahwa seluruh perangkat daerah harus menyesuaikan kontrak kerja sampai dengan Bulan November Tahun 2023. Artinya, setda akan kehilangan tenaga teknis dari non ASN termasuk yang melakukan pelayanan di Museum dan Pintu Gesat sehingga dapat dipastikan akan memberikan beban kerja tambahan kepada pegawai eksisting. Tentunya, dapat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kinerja.

Selanjutnya, dari sisi pengelolaan kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai belum dilakukan secara tersentral. Penyusunan Anjab ABK dilakukan oleh pengelola kepegawaian biro yang belum memiliki keahlian spesifik tersebut. Selanjutnya, setda belum memiliki peta pengembangan kompetensi yang mencakup seluruh biro. Akibatnya, beberapa biro melakukan perencanaan pengembangan tersendiri yang tidak disertai dengan pelaporan kepada kepegawaian setda. Sehingga tidak ada rekam jejak peningkatan kompetensi yang dibagi bersama.

Disamping itu, setda masih kekurangan pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. Hal ini didorong oleh minimnya minat pegawai terhadap jabatan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa jabatan tersebut beresiko tinggi.

4. Budaya

Hasil Survey ASN BerAkhlak yang pernah dilakukan oleh Biro Organisasi terhadap 36 perangkat daerah pada Tahun 2022 memperlihatkan bahwa setda telah mempraktikkan nilai-nilai dasar berAkhlak yang konsisten. Adapun nilai yang diperoleh setda adalah sebesar 61.675 yang dapat diinterpretasikan bahwa setda telah dapat mengedukasi pihak lain untuk membangun kerja sama yang sinergis. Hal ini mencakup tindakan memberi kesempatan serta bersikap terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

Namun demikian, nilai tersebut masih dikatakan belum cukup karena nilai maksimal internalisasi budaya berAkhlak pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah 100. Tingkat selanjutnya adalah mampu merancang program yang memudahkan pihak lain untuk mempraktekan sikap berAkhlak. Salah satunya adalah dengan memahami kebutuhan masyarakat, solutif, dapat diandalkan, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan.

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kebijakan Pemda Prov Jabar belum unggul	Data relevan pendukung perumusan kebijakan minimal	Track record penyusunan kebijakan pada Pemda Prov Jabar lemah
		Pelibatan stakeholder kurang representatif	Pemahaman aparaturnya terhadap substansi kebijakan kurang
		Evaluasi dan dampak kemanfaatan kebijakan belum dilakukan	Ketiadaan prosedur dan alat pemantauan serta evaluasi kebijakan
2	Budaya kinerja baik belum merata terjadi pada seluruh perangkat daerah	Urgensi penerapan <i>core value</i> berAkhlak baru dipahami oleh sedikit perangkat daerah	Upaya internalisasi budaya kinerja dan manajemen perubahan belum menyentuh secara substansi
3	Penataan organisasi belum efektif	Struktur organisasi belum didasarkan pada arsitektur kinerja/proses bisnis	Arsitektur kinerja tidak ditindaklanjuti oleh perubahan struktur
4	Mekanisme kerja belum efektif meningkatkan performa instansi	Relasi konseptual antara proses bisnis dan pengukuran kinerja belum jelas	Definisi kerja dan kinerja serta kinerja bersifat rutin dan <i>project</i> belum dirumuskan
		Keterhubungan proses bisnis dan prosedur kerja belum dirumuskan	Proses bisnis eksisting belum ideal
5	Pengelolaan barang/jasa pada Pemda Prov Jabar belum optimal	Penggunaan sistem pada pengadaan barang/jasa masih kurang	Kepatuhan perangkat daerah dalam penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa masih rendah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kapasitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa belum memenuhi	Jumlah SDM PBJ bersertifikat belum memenuhi kuota
6	Kebijakan Pemda Prov Jabar cenderung masih disharmonis	Peta harmonisasi kebijakan belum mencakup seluruh kebijakan pada Pemda Prov Jabar	Tidak lanjut terhadap harmonisasi kebijakan lambat
7	Akuntabilitas kinerja belum optimal	Hasil evaluasi kinerja belum dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi pada perencanaan selanjutnya	Pelaporan kinerja belum informatif dan belum dimanfaatkan secara optimal
8	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Pengelolaan pengaduan pelayanan dan konsultasi belum optimal	Belum adanya sistem pengaduan terintegrasi pada seluruh layanan publik oleh Pemda Prov Jabar
9	Setda belum berlaku sebagai satu perangkat daerah yang utuh	Koordinasi lemah	Belum adanya mekanisme kerja yang dapat meruntuhkan budaya silo dan meminimalisir lebarnya rentang kendali yang disebabkan oleh struktur organisasi

3.2. Isu Strategis Sekretariat Daerah

Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kemudian isu strategis memiliki karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Rumusan isu strategis harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Atas dasar hal tersebut, penentuan isu strategis pada setda dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pada tingkat

internasional, nasional, dan provinsi sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi.

Pada tingkat internasional, *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda penting yang disepakati oleh para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Agenda ini menginginkan tidak ada satu orang pun yang tidak tersentuh oleh pembangunan (*no one left behind*). Untuk mewujudkan itu, SDGs memiliki 17 sasaran dan 169 indikator yang mencakup empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola.

Pada pilar hukum dan tata kelola, kelembagaan yang tangguh (*strong institution*) menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai (SDGs 16). Salah satu fokus pada sasaran ini adalah kondisi pemerintahan sebagai institusi penggerak pembangunan. Bahwa kelembagaan yang tangguh akan mendukung pencapaian target-target SDGs lainnya dan untuk mewujudkan itu, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu efektivitas, transparansi, akuntabilitas, anti korupsi, partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Sejalan dengan Agenda 2030 SDGs, Indonesia menetapkan Visi 2045 yang juga mengusung keinginan '*no one left behind*'. Visi ini ditopang oleh empat pilar yaitu pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar terakhir, merupakan aplikasi SDGs 16 di Indonesia.

Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, ditetapkan tiga milestones dalam peta jalan menuju visi 2045 yaitu infrastruktur birokrasi yang solid dan kokoh (2016-2025), pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (2026-2035), serta kelembagaan birokrasi yang andal dan modern (2036-2045). Merujuk pada peta jalan ini, spesifik pada kurun waktu perencanaan strategis Tahun 2024-2026, setda perlu memperhatikan *milestone* pada termin pertama dan kedua. Kedua *milestones* tersebut menjadi isu strategis di tingkat nasional yang

menjadi rujukan utama bagi penetapan isu strategis setda. Selain itu, penting bagi setda untuk merujuk pada penerjemahan Visi Indonesia 2045 dalam perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, penerjemahan Visi Indonesia 2045 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 digambarkan dalam empat isu strategis. Keempat isu tersebut adalah kualitas dan daya saing, pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan demokrasi dan reformasi birokrasi. Isu keempat merupakan penjabaran dari isu tentang ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Dari uraian isu-isu strategis secara berjenjang di atas, serta mempertimbangkan hasil evaluasi penyelenggaraan kinerja setda pada periode sebelumnya, maka isu strategis setda adalah: **'pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat'**. Berkaitan hal ini, arah kebijakan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah penerapan reformasi birokrasi pada seluruh level pemerintah. Kebijakan terbaru adalah adanya pemfokusan penerapan pada dua sisi. Pertama adalah reformasi birokrasi secara umum atau diistilahkan sebagai reformasi birokrasi general dan kedua adalah reformasi birokrasi tematik untuk melihat dampak penerapan reformasi birokrasi terhadap kondisi pembangunan masyarakat. Mengingat pembaharuan tersebut untuk periode Tahun 2024-2026, setda akan memfokuskan pada pemantapan reformasi birokrasi general.

Tabel 3.2
Isu Strategis Sekretariat Daerah

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional	Kelembagaan yang tangguh	Efektif
			Transparan
			Akuntabel
			Anti korupsi

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
			Keterlibatan semua pihak secara setara dalam pengambilan keputusan
			Akses terhadap informasi
			Penegakan hukum dan kebijakan yang tidak diskriminatif
2	Nasional	Infrastruktur birokrasi yang solid dan kokoh	Struktur yang ramping
			eGovernment
			Human capital management
			Budaya ASN yang melayani dengan basis kebutuhan masyarakat (<i>citizen demand</i>)
		ASN berwawasan global	
		<i>Merit-based system</i>	
		Pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif	Struktur berbasis <i>outcome</i>
			<i>Open government</i>
Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan warga (<i>citizen centric</i>)			
ASN yang kompetitif			
3	Provinsi	Peningkatan demokrasi dan reformasi birokrasi	Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas Lembaga demokrasi
			Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan inovasi daerah
4	Sekretariat Daerah	Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pelaksanaan reformasi birokrasi general

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Tujuan dan sasaran setda merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja setda secara keseluruhan. Sehingga rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menentukan pilihan-pilihan strategi kinerja serta merupakan sarana untuk mengevaluasi strategi-strategi tersebut. Kemudian, rumusan tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi baik pada tingkat nasional maupun provinsi serta memenuhi kriteria SMART-C.

Sesuai isu strategis yang telah dirumuskan yaitu 'pemanjangan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan', tujuan kinerja setda diarahkan pada perwujudan kondisi tersebut dalam ruang lingkup tugas dan fungsi. Perumusan tujuan ini juga merujuk kepada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sebagaimana prinsip penjenjangan kinerja untuk memastikan penyalarsan pembangunan provinsi dan unit kerja.

Selanjutnya untuk mencapai kondisi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja sebagai *milestone* yang ditargetkan dicapai per tahun. Penentuan sasaran strategis setda didasarkan pada faktor penentu keberhasilan yang diidentifikasi sebagai kunci penyelesaian isu strategis. Sasaran strategis setda diarahkan untuk penciptaan kondisi tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan internal setda sebagai upaya dalam menyelesaikan isu dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya,

Sebagaimana pembaharuan yang dilakukan dalam memantapkan penyelenggaraan reformasi birokrasi di tingkat nasional yang membagi fokus implementasi pada reformasi secara umum serta yang dapat memperlihatkan dampaknya kepada pembangunan, setda pun

melakukan fokus tersebut. Sesuai dengan kendali kewenangan, maka sasaran strategis setda difokuskan pada pencapaian indikator reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada level general.

Tabel 4.1.

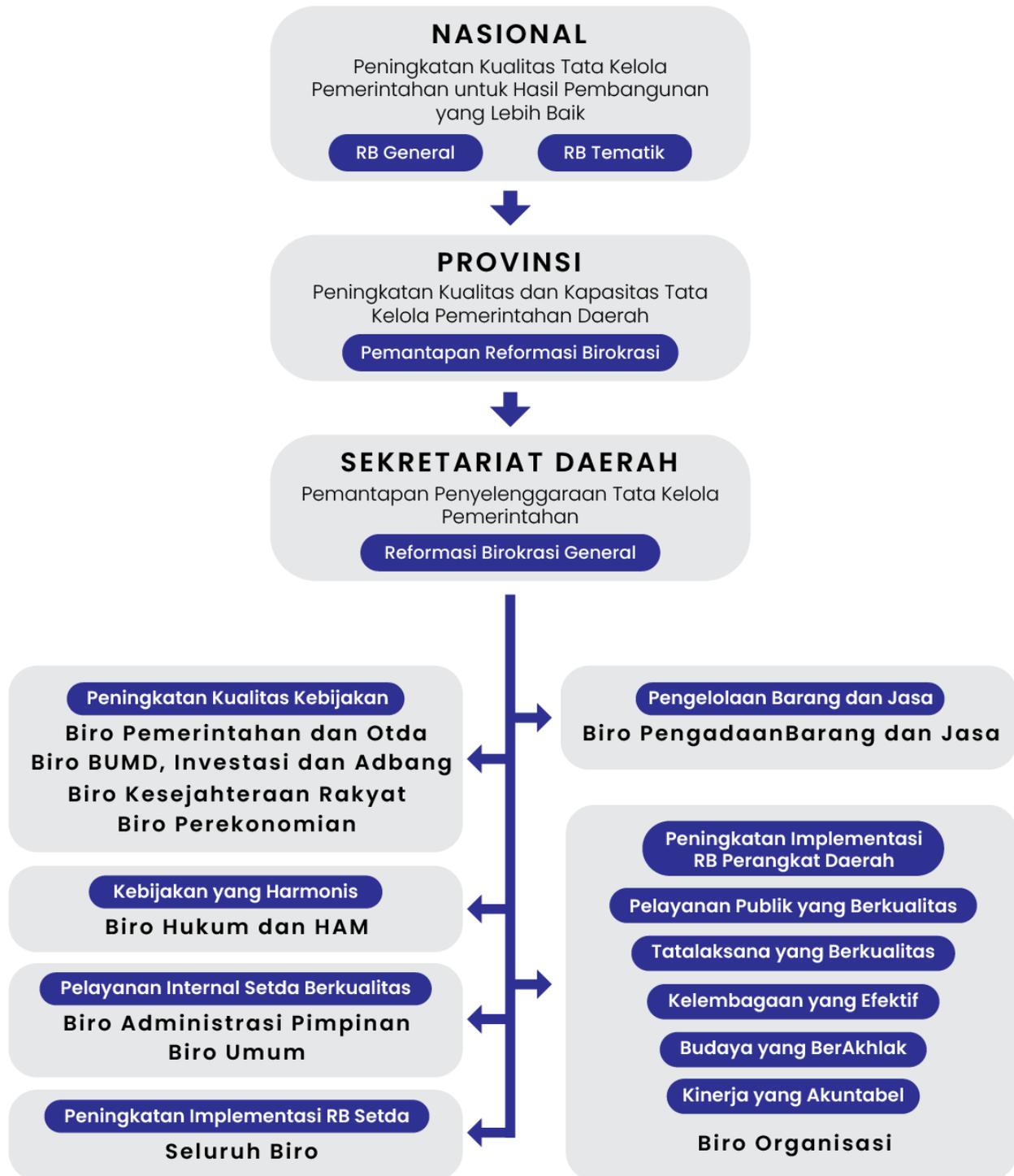
Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator	Sasaran Strategis	Indikator
Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi General

4.2. *Cascading* Kinerja Sekretariat Daerah

Cascading kinerja merupakan arsitektur kinerja yang akan memperlihatkan adanya keterkaitan kinerja setda dengan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Lebih jauh juga keterkaitan antara kinerja unit kerja terhadap kondisi yang ingin diwujudkan oleh setda. Sehingga, kontribusi unit kerja terhadap pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat terlihat dengan jelas.

Gambar 4.1. Cascading Kinerja Setda Tahun 2024-2026



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat didasarkan pada Tujuan dan Sasaran perangkat daerah untuk periode perencanaan mendatang. Strategi dan arah kebijakan menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah ini mencapai tujuan dan sasaran selama periode perencanaan, dan target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Strategi dan arah kebijakan ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan.

Strategi yang disusun pada bagian ini merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan rencana besar perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sementara, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah yang memberikan arahan dan panduan kepada seluruh unit kerja Sekretariat Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam tahapan pembangunan selama tiga tahun periode transisi kepemimpinan Gubernur Jawa Barat guna mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara bertahap.

Berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis, maka strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah untuk periode perencanaan 3 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Mewujudkan <i>agile organization</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun strategi <i>agile organization</i>2. Menyusun struktur organisasi mendukung <i>agile organization</i>3. Meningkatkan kapabilitas dan sumberdaya organisasi
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun budaya pelayanan2. Mengembangkan standar pelayanan3. Membangun sistem pelayanan yang efisien4. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Memantapkan pemahaman terhadap penjenjangan kinerja2. Meningkatkan pemanfaatan laporan kinerja3. Mengembangkan sistem informasi untuk integrasi kinerja unit dan individu yang lebih efisien dan efektif
		Mewujudkan transformasi birokrasi	Mengubah budaya kinerja Pemda Prov Jabar
		Meningkatkan kualitas kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan2. Meningkatkan kualitas evaluasi pemanfaatan kebijakan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan sistem informasi pengadaan2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan barang dan jasa
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan Setda	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan sistem pengendalian kinerja Setda2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat pula sub kegiatan yang merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan sasaran dan indikator sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat Daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, diperlukan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah tersebut. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan setda disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk periode Tahun 2024-2026, setda merencanakan delapan program, 29 kegiatan, dan 85 sub kegiatan dengan anggaran secara berturut-turut sebesar Rp816.396.439.294., Rp814.053.396.574., dan Rp865.764.857.407.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI	
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16	
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	kategori	N/A	A	816,396,439,294	A	814,053,396,574	A	865,764,857,407	A	2,496,214,693,276	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	
			Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi General	nilai	N/A	80,75	816,396,439,294	80,83	814,053,396,574	80,91	865,764,857,407	80,91	2,493,014,441,239	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	
				Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	N/A	50,15	28,596,100,000	50,20	31,455,710,000	50,25	34,601,281,000	50,25	94,653,091,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat
		1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	N/A	50,00	4,417,000,000	50,50	4,858,700,000	51,01	5,344,570,000	51,01	14,620,270,000			
		01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	10	2	990,000,000	2	1,089,000,000	2	1,197,900,000	6	3,276,900,000			
		02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	2	2	1,860,000,000	2	2,046,000,000	2	2,250,600,000	6	6,156,600,000			
		03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	2	1	1,567,000,000	1	1,723,700,000	1	1,896,070,000	3	5,186,770,000			
		1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	N/A	50,0	6,359,100,000	50,50	6,995,010,000	51,01	7,694,511,000	51,01	21,048,621,000			
		01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	2	4	2,295,400,000	4	2,524,940,000	4	2,777,434,000	12	7,597,774,000			
		02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Dokumen	2	4	1,063,700,000	4	1,170,070,000	4	1,287,077,000	12	3,520,847,000			
		03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	2	4	3,000,000,000	4	3,300,000,000	4	3,630,000,000	12	9,930,000,000			
		1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	N/A	97,55	17,820,000,000	98,53	19,602,000,000	99,51	21,562,200,000	99,51	58,984,200,000			
		01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	64	62	15,345,000,000	62	16,879,500,000	62	18,567,450,000	186	50,791,950,000			
		02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	26	26	990,000,000	26	1,089,000,000	26	1,197,900,000	78	3,276,900,000			
		03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	3	6	1,485,000,000	6	1,633,500,000	6	1,796,850,000	18	4,915,350,000			
				Program Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi	poin	N/A	85,50	3,731,719,727	86,35	4,104,891,699	87,21	4,515,380,869	87,21	11,193,492,296		
		1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	900,000,000	100	990,000,000	100	1,089,000,000	100	1,820,500,000			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Dokumen	N/A	11	550,000,000	11	605,000,000	12	665,500,000	34	1,820,500,000			
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		6				



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16
					Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	350,000,000	100	385,000,000	100	423,500,000	100	1,158,500,000	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	18	350,000,000	18	385,000,000	18	423,500,000	54	1,158,500,000	
			1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	N/A	100	2,831,719,727	100	3,114,891,699	100	3,426,380,869	100	9,372,992,296	
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	12	550,000,000	12	605,000,000	12	665,500,000	36	1,820,500,000	
					Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	2,281,719,727	100	2,509,891,699	100	2,760,880,869	100	7,552,492,296	
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	2,281,719,727	12	2,509,891,699	12	2,760,880,869	36	7,552,492,296	
		4	1	5	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen	N/A	85,00	12,592,159,950	87,10	13,851,375,950	87,99	15,236,513,610	87,99	41,680,049,510	
			1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persen	N/A	100	7,499,859,450	100	8,249,845,400	100	9,074,830,000	100	24,824,534,850	
				01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Dokumen	30	30	2,039,061,350	30	2,242,967,450	30	2,467,264,200	90	6,749,293,000	
				02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Dokumen	800	800	350,262,200	800	385,288,450	800	423,817,300	2400	1,159,367,950	
				03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Dokumen	12	12	3,786,032,900	12	4,164,636,200	12	4,581,099,850	36	12,531,768,950	
				04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Dokumen	210	210	1,324,503,000	210	1,456,953,300	210	1,602,648,650	630	4,384,104,950	
			1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	N/A	100	5,092,300,500	100	5,601,530,550	100	6,161,683,610	100	16,855,514,660	
				01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Kasus	N/A	15	2,982,771,000	15	3,281,048,100	15	3,609,152,910	45	9,872,972,010	
				02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Kasus	N/A	25	2,109,529,500	25	2,320,482,450	25	2,552,530,700	75	6,982,542,650	
		4	1	1	Program Administrasi Umum	kategori	N/A	86,51	2,227,740,250	87,37	2,444,907,450	88,25	2,683,791,111	88,25	7,356,438,811	
			1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	N/A	100	797,062,500	100	871,161,850	100	952,671,035	100	2,620,895,385	
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	11	768,675,000	11	839,935,500	12	918,322,050	34	2,526,932,550	
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		6		
					Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	28,387,500	100	31,226,350	100	34,348,985	100	93,962,835	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	18	28,387,500	18	31,226,350	18	34,348,985	54	93,962,835	
			1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	N/A	100	1,430,677,750	100	1,573,745,600	100	1,731,120,076	100	4,735,543,426	
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	5	210,005,600	5	231,006,200	5	254,106,776	15	695,118,576	
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	10	5	40,000,000	5	44,000,000	5	48,400,000	15	132,400,000	

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI		
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16		
					Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	1,180,672,150	100	1,298,739,400	100	1,428,613,300	100	3,908,024,850			
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1,180,672,150	12	1,298,739,400	12	1,428,613,300	36	3,908,024,850			
		4	1	4	Program Kesejahteraan Rakyat	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Poin	N/A	50,15	140,985,000,000	50,20	103,383,500,000	50,25	113,721,850,000	50,25	358,090,350,000		
			1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	N/A	70,00	113,100,000,000	70,70	72,710,000,000	71,41	79,981,000,000	71,41	265,791,000,000			
			01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola	Unit	5	9	19,600,000,000	9	21,560,000,000	9	23,716,000,000	9	64,876,000,000			
			02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah lembaga spiritual yang difasilitasi	Lembaga	9	15	93,500,000,000	15	51,150,000,000	15	56,265,000,000	45	200,915,000,000			
			1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	N/A	70,00	18,885,000,000	70,70	20,773,500,000	71,41	22,850,850,000	71,41	62,509,350,000			
			01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	8	3	5,100,000,000	3	5,610,000,000	3	6,171,000,000	9	16,881,000,000			
			02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	5	5	6,785,000,000	5	7,463,500,000	5	8,209,850,000	15	22,458,350,000			
			03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	2	5	7,000,000,000	5	7,700,000,000	5	8,470,000,000	15	23,170,000,000			
			1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	N/A	70,00	9,000,000,000	70,70	9,900,000,000	71,41	10,890,000,000	71,41	29,790,000,000			
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	5	3	3,000,000,000	3	3,300,000,000	3	3,630,000,000	9	9,930,000,000			
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	19	5	3,000,000,000	5	3,300,000,000	5	3,630,000,000	15	9,930,000,000			
			03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi,	Dokumen	3	3	3,000,000,000	3	3,300,000,000	3	3,630,000,000	9	9,930,000,000			

Biro Kesejahteraan Rakyat

Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16
			Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan												
		4 1 1	Program Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Kategori	N/A	90,44	4,860,000,000	91,34	5,346,000,000	92,25	5,880,600,000	92,25	16,086,600,000		
			1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	950,000,000	100	1,045,000,000	100	1,149,500,000	100	3,144,500,000		
			01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Dokumen	11	11	650,000,000	9	715,000,000	9	786,500,000	29	2,151,500,000		
			04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		6			
				Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	300,000,000	100	330,000,000	100	363,000,000	100	993,000,000		
			07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	18	300,000,000	18	330,000,000	18	363,000,000	54	993,000,000		
			1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Persen	N/A	100	2,020,000,000	100	2,222,000,000	100	2,444,200,000	100	6,686,200,000		
			03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	N/A	3	2,020,000,000	3	2,222,000,000	3	2,444,200,000	9	6,686,200,000		
			1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	1,890,000,000	100	2,079,000,000	100	2,286,900,000	100	6,255,900,000		
			02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	1,190,000,000	12	1,309,000,000	12	1,439,900,000	36	3,938,900,000		
				Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	700,000,000	100	770,000,000	100	847,000,000	100	2,317,000,000		
			09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	700,000,000	12	770,000,000	12	847,000,000	36	2,317,000,000		
		4 1 6	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD	Poin	N/A	50,15	9,293,886,001	50,20	10,223,274,600	50,25	11,245,602,060	50,25	30,762,762,662		
			1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Investasi Daerah yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	N/A	50,00	3,373,500,000	50,50	3,710,850,000	51,01	4,081,935,000	51,01	11,166,285,000		
			02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	9	6	3,373,500,000	6	3,710,850,000	6	4,081,935,000	18	11,166,285,000		
			1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	N/A	50,00	5,920,386,001	50,50	6,512,424,600	51,01	7,163,667,060	51,01	19,596,477,662		
			01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	6	7	1,274,942,902	7	1,402,437,192	7	1,542,680,911	21	4,220,061,005		
			02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	11	7	4,261,137,275	7	4,687,251,002	7	5,155,976,102	21	14,104,364,380		
			03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	6	4	384,305,824	4	422,736,406	4	465,010,047	12	1,272,052,277		

Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan

Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16
		4 1 8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan lingkup Administrasi Pembangunan	Persen	N/A	100	826,150,000	100	908,765,000	100	999,641,500	100	2,734,556,500		
		1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Disampaikan	Dokumen	N/A	5	826,150,000	5	908,765,000	5	999,641,500	15	2,734,556,500		
		01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	5	5	826,150,000	5	908,765,000	5	999,641,500	15	2,734,556,500		
		4 1 1	Program Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	kategori	N/A	88,95	1,273,938,106	89,94	1,401,331,916	90,74	1,541,465,107	90,74	4,216,735,129		
		1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	153,738,000	100	169,111,800	100	186,022,980	100	508,872,780		
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Dokumen	N/A	11	65,910,000	11	72,501,000	12	79,751,100	34	218,162,100		
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		6			
				Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	87,828,000	100	96,610,800	100	106,271,880	100	290,710,680		
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	4	87,828,000	4	96,610,800	4	106,271,880	12	290,710,680		
		1.05	Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai yang Meningkatkan Kompetensinya	Persen	N/A	100	145,457,846	100	160,003,630	100	176,003,993	100	481,465,469		
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	52	145,457,846	52	160,003,630	52	176,003,993	52	481,465,469		
		1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	331,579,200	100	364,737,120	100	401,210,832	100	1,097,527,152		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	331,579,200	12	364,737,120	12	401,210,832	36	1,097,527,152		
				Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	1,536,060,000	100	1,689,666,000	100	1,858,632,600	100	5,084,358,600		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1,536,060,000	12	1,689,666,000	12	1,858,632,600	36	5,084,358,600		
		1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tim Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Tenaga Teknis	Persen	N/A	100	643,163,060	100	707,479,366	100	778,227,302	100	2,128,869,728		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	643,163,060	12	707,479,366	12	778,227,302	36	2,128,869,728		
		4 1 6	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Poin	N/A	50,15	6,787,550,000	50,20	7,466,305,000	50,25	8,212,935,500	50,25	22,466,790,500		
		1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	N/A	50,00	3,317,750,000	50,50	3,649,525,000	51,01	4,014,477,500	151,51	10,981,752,500		
		01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	8	5	450,000,000	6	495,000,000	6	544,500,000	17	1,489,500,000	3317750000	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat
		02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	9	4	2,867,750,000	5	3,154,525,000	5	3,469,977,500	14	9,492,252,500		
		1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	N/A	50,00	3,469,800,000	50,50	3,816,780,000	51,01	4,198,458,000	151,51	11,485,038,000		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16
				01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	10	6	3,009,800,000	7	3,310,780,000	7	3,641,858,000	20	9,962,438,000
				02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	5	2	240,000,000	3	264,000,000	3	290,400,000	8	794,400,000
				03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	4	1	220,000,000	2	242,000,000	2	266,200,000	5	728,200,000
		4	1	1	Program Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Perekonomian	kategori	N/A	95,2	5,401,482,243	95,29	5,941,630,467	95,39	6,535,793,513	95,39	17,878,906,224
				1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	1,057,222,852	100	1,162,945,137	100	1,279,239,650	100	3,499,407,640
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Dokumen	N/A	11	417,772,000	11	459,549,200	12	505,504,120	34	1,382,825,320
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		6	
						Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	639,450,852	100	703,395,937	100	773,735,530	100	2,116,582,320
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	18	639,450,852	18	703,395,937	18	773,735,530	54	2,116,582,320
				1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	4,344,259,391	100	4,778,685,330	100	5,256,553,863	100	14,379,498,584
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	12	250,019,000	12	275,020,900	12	302,522,990	36	827,562,890
						Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	4,094,240,391	100	4,503,664,430	100	4,954,030,873	100	13,551,935,694
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	4,094,240,391	12	4,503,664,430	12	4,954,030,873	36	13,551,935,694
		4	1	7	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Level Maturitas UKPBJ	Level	3	3	7,589,910,000	3	8,348,901,000	3	9,183,791,100	3	25,122,602,100
				1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1) Persentase Proses Pemilihan Penyedia yang Tepat Waktu	Persen	N/A	96	1,626,570,000	98	1,789,227,000	100	1,968,149,700	100	5,383,946,700
				01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	10	423,500,000	15	465,850,000	20	512,435,000	45	1,401,785,000
				02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	12	537,570,000	12	591,327,000	12	650,459,700	36	1,779,356,700
						2) Persentase Pengadaan Barang Jasa yang Dilaksanakan Tepat Sasaran	Persen	N/A	96	665,500,000	98	732,050,000	100	805,255,000	100	2,202,805,000
				03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	12	665,500,000	12	732,050,000	12	805,255,000	36	2,202,805,000
				1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1) Persentase Peningkatan Fitur Sistem Informasi Pengadaan	Persen	N/A	96	4,468,000,000	98	4,914,800,000	100	5,406,280,000	100	14,789,080,000
				01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	12	544,500,000	12	598,950,000	12	658,845,000	36	1,802,295,000
				02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	12	3,500,000,000	12	3,850,000,000	12	4,235,000,000	36	11,585,000,000

Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Luas dan Dalam Provinsi Jawa Barat



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16
				2) Persentase Layanan SPSE yang Dipenuhi	Persen	N/A	96	423,500,000	98	465,850,000	100	512,435,000	100	1,401,785,000		
			03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	12	423,500,000	12	465,850,000	12	512,435,000	36	1,401,785,000		
		1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	N/A	96	1,495,340,000	98	1,644,874,000	100	1,809,361,400	100	4,949,575,400		
			01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	30	90	333,300,000	95	366,630,000	95	403,293,000	280	1,103,223,000		
			03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	12	722,040,000	12	794,244,000	12	873,668,400	36	2,389,952,400		
				Nilai Kematangan UKPBJ Dimensi Kelembagaan	Level	N/A	3	440,000,000	3	484,000,000	3	532,400,000	3	1,456,400,000		
			02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	12	440,000,000	12	484,000,000	12	532,400,000	36	1,456,400,000		
		4	1	1	Program Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori	N/A	96,82	2,875,835,906	96,91	3,163,419,496	97,01	3,479,761,445	97,01	9,519,016,847
			1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	N/A	100	93,049,000	100	102,353,900	100	112,589,290	100	307,992,190		
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	11	8,349,000	11	9,183,900	12	10,102,290	34	27,635,190		
			04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	N/A	2									
				Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	84,700,000	100	93,170,000	100	102,487,000	100	280,357,000		
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	18	84,700,000	18	93,170,000	18	102,487,000	54	280,357,000		
			1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	N/A	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100	728,200,000		
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Formal	Orang	40	22	220,000,000	24	242,000,000	26	266,200,000	72	728,200,000		
			1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	N/A	100	2,504,667,636	100	2,755,134,399	100	3,030,647,839	100	8,290,449,874		
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	1	482,740,500	1	531,014,550	1	584,116,005	3	1,597,871,055		
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	5	1	145,813,140	1	160,394,454	1	176,433,899	3	482,641,493		
				Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	1,876,113,996	100	2,063,725,395	100	2,270,097,935	100	6,209,937,326		
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1,876,113,996	12	2,063,725,395	12	2,270,097,935	36	6,209,937,326		
			1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100	58,119,270	100	63,931,197	100	70,324,316	100	192,374,783		
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	58,119,270	12	63,931,197	12	70,324,316	36	192,374,783		
		4	1	2	Program Penataan Organisasi		N/A	3		4		5		5	Biro Organisasi	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI	
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16	
				1) Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	Peringkat			4,425,903,544		4,868,493,898		5,355,343,287		14,649,740,734			
		1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1) Presentase Perangkat Daerah yang Ditata Kelembagaannya	Persen	N/A	80	1,171,656,585	90	1,288,822,243	100	1,417,704,467	100	3,878,183,295			
			01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	1	37	371,954,605	37	409,150,065	37	450,065,072	111	1,231,169,742			
				2) Indikator Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	Poin	N/A	80	502,138,450	85	552,352,295	90	607,587,524	90	1,662,078,269			
			02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	27	27	502,138,450	27	552,352,295	27	607,587,524	81	1,662,078,269			
				3) Persentase Peta Jabatan Yang Sesuai Anjab Hasil Verifikasi	Persen	N/A	100	297,563,530	100	327,319,883	100	360,051,871	100	984,935,284			
			03 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	Dokumen	47	47	297,563,530	47	327,319,883	47	360,051,871	141	984,935,284			
				2) Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Minimal kategori "B"	Persen	N/A	92	3,254,246,959	94	3,579,671,655	100	3,937,638,820	100	10,771,557,439			
		1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1) Persentase Kebijakan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang diinternalisasikan	Persen	N/A	100	3,254,246,959	100	3,579,671,655	100	3,937,638,820	100	10,771,557,439			
			01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	Dokumen	1	1	688,116,019	1	756,927,621	1	832,620,383	3	2,277,664,025			
				3) Nilai Pelaporan Kinerja	Poin	N/A	12,35	632,322,828	12,44	695,555,111	12,54	765,110,622	12,54	2,092,988,562			
				2) Persentase Perangkat Daerah dengan Pelaporan Kinerja Berkualitas	Persen	N/A	100	632,322,828	100	695,555,111	100	765,110,622	100	2,092,988,562			
			02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Dokumen	1	38	632,322,828	38	695,555,111	38	765,110,622	114	2,092,988,562			
				4) Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai budaya kerja minimal "Baik"	Persen	N/A	65,79	297,563,684	73,68	327,320,052	81,57	360,052,057	81,57	984,935,794			
				3) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja	Persen	N/A	100	297,563,684	100	327,320,052	100	360,052,057	100	984,935,794			
			03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Laporan	1	1	297,563,684	1	327,320,052	1	360,052,057	3	984,935,794			
				5) Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Sistem Kerja Dinamis	Persen	N/A	100	632,322,828	100	695,555,111	100	765,110,622	100	2,092,988,562			
				4) Persentase Kebijakan Sistem Kerja Dinamis yang Sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	632,322,828	100	695,555,111	100	765,110,622	100	2,092,988,562			
			04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	Dokumen	1	1	632,322,828	1	695,555,111	1	765,110,622	3	2,092,988,562			
				6) Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	Persen	N/A	80	1,003,921,600	85	1,104,313,760	90	1,214,745,136	90	3,322,980,496			
				5) Presentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Standar Pelayanan	Persen	N/A	80	1,003,921,600	85	1,104,313,760	90	1,214,745,136	90	3,322,980,496			
			05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Dokumen	1	38	1,003,921,600	38	1,104,313,760	38	1,214,745,136	114	3,322,980,496			
		4	1	1	Program Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Organisasi	Kategori	N/A	87,71	1,633,326,421	88,59	1,809,659,063	89,47	1,999,624,968	89,47	5,442,610,453	

Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI			
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)					
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16			
				1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	270,000,000	100	310,000,000	100	350,000,000	100	930,000,000			
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	11	120,000,000	11	140,000,000	12	160,000,000	34	420,000,000		
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		6			
						Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	150,000,000	100	170,000,000	100	190,000,000	100	510,000,000			
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	18	150,000,000	18	170,000,000	18	190,000,000	54	510,000,000		
				1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	1,363,326,421	100	1,499,659,063	100	1,649,624,968	100	4,512,610,453			
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	12	183,522,790	12	201,875,069	12	222,062,575	36	607,460,434		
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	12	42,332,070	12	46,565,277	12	51,221,804	36	140,119,151		
						Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	1,137,471,561	100	1,251,218,717	100	1,376,340,589	100	3,765,030,868			
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	12	1,137,471,561	12	1,251,218,717	12	1,376,340,589	36	3,765,030,868		
		4	1	1	Program Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Administrasi Pimpinan	Kategori	N/A	94,61	66,531,500,000	94,71	72,575,000,000	94,80	78,623,000,000	94,80	217,729,500,000			
				1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	220,000,000	100	240,000,000	100	260,000,000	100	720,000,000			
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	11	132,000,000	11	144,000,000	12	156,000,000	34	432,000,000		
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		6			
						Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	88,000,000	100	96,000,000	100	104,000,000	100	288,000,000			
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	18	88,000,000	18	96,000,000	18	104,000,000	54	288,000,000		
				1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	4,550,500,000	100	4,964,000,000	100	5,378,000,000	100	14,892,500,000			
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	3	302,000,000	3	330,000,000	3	357,000,000	9	989,000,000		
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	232,500,000	2	254,000,000	2	275,000,000	6	761,500,000		
						Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	4,016,000,000	100	4,380,000,000	100	4,746,000,000	100	13,142,000,000			
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	4,016,000,000	12	4,380,000,000	12	4,746,000,000	36	13,142,000,000		
				1.12	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	34,323,000,000	100	37,439,000,000	100	40,559,000,000	100	112,321,000,000			
					01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	14,808,000,000	12	16,154,000,000	12	17,500,000,000	36	48,462,000,000		
					02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	10,000,000,000	12	10,905,000,000	12	11,814,000,000	36	32,719,000,000		

Biro Administrasi Pimpinan

Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI		
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16		
				03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	9,515,000,000	12	10,380,000,000	12	11,245,000,000	36	31,140,000,000		
				1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Informasi dan Komunikasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	17,503,000,000	100	19,094,000,000	100	20,685,000,000	100	57,282,000,000		
				01	Penyiapan Materi Pimpinan yang Disiapkan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	12	12	3,188,000,000	12	3,478,000,000	12	3,767,000,000	36	10,433,000,000		
				02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	12	10,267,000,000	12	11,200,000,000	12	12,134,000,000	36	33,601,000,000		
				03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	12	12	4,048,000,000	12	4,416,000,000	12	4,784,000,000	36	13,248,000,000		
				1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Layanan Keprotokolan yang Dipenuhi		N/A	100	9,935,000,000	100	10,838,000,000	100	11,741,000,000	100	32,514,000,000		
				01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	12	12	3,307,000,000	12	3,607,000,000	12	3,908,000,000	36	10,822,000,000		
				02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	12	2,393,000,000	12	2,611,000,000	12	2,828,000,000	36	7,832,000,000		
				03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	12	12	4,235,000,000	12	4,620,000,000	12	5,005,000,000	36	13,860,000,000		
		4	1	1	Program Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Umum	Kategori	N/A	90,68	516,764,237,146	91,58	536,760,231,035	92,50	561,948,482,337	92,50	1,613,431,198,473		
				1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran Sekretariat Daerah	Poin	N/A	26,15	1,750,000,000	26,18	1,875,000,000	26,2	2,010,000,000	26,2	5,635,000,000		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	11	650,000,000	11	715,000,000	12	786,500,000	34	2,151,500,000		
						Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Poin	N/A	100	300,000,000	100	325,000,000	100	350,000,000	100	975,000,000		
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	3	3	300,000,000	3	325,000,000	3	350,000,000	9	975,000,000		
						Nilai Komponen Pelaporan dan Evaluasi Sekretariat Daerah	Poin	N/A	16,11	350,000,000	16,13	385,000,000	16,14	423,500,000	16,14	1,158,500,000		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	17	350,000,000	17	385,000,000	17	423,500,000	51	1,158,500,000	Biro Umum	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat
						Nilai Komponen Pelaporan dan Evaluasi Sekretariat Daerah	Poin	N/A	100	450,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	100	1,350,000,000		
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	18	450,000,000	18	450,000,000	18	450,000,000	54	1,350,000,000		
				1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai dan Pimpinan yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	Persen	N/A	100	226,198,338,471	100	226,231,021,754	100	226,266,973,366	100	678,696,333,592		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	800	750	223,234,520,000	750	223,234,520,000	750	223,234,520,000	750	669,703,560,000		
						Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Laporan	N/A	12	1,756,968,766	12	1,756,968,766	12	1,756,968,766	12	5,270,906,298		
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	1,756,968,766	12	1,756,968,766	12	1,756,968,766	36	5,270,906,298		
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	854,716,799	12	854,716,799	12	854,716,799	36	2,564,150,397		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	25,300,072	1	25,300,072	1	25,300,072	1	75,900,216	
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	N/A	16	326,832,834	16	359,516,117	16	395,467,729	16	1,081,816,681	
		1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah yang Diamankan	Persen	N/A	100	1,540,007,136	100	1,694,007,849	100	1,863,408,634	100	5,097,423,620	
			06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	1,540,007,136	12	1,694,007,849	12	1,863,408,634	36	5,097,423,620	
		1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Terlayani Tepat Waktu	Persen	N/A	100	4,200,000,000	100	4,200,000,000	100	4,200,000,000	100	12,600,000,000	
			03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	700	12	4,200,000,000	12	4,200,000,000	12	4,200,000,000	36	12,600,000,000	
					Persentase Pegawai yang Memenuhi Syarat Kompetensi Jabatan	Persen	N/A	100	2,500,000,000	100	2,500,000,000	100	2,500,000,000	100	7,500,000,000	
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	500	2,500,000,000	500	2,500,000,000	500	2,500,000,000	1500	7,500,000,000	
		1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi	Persen	N/A	100	44,530,097,473	100	46,052,179,967	100	49,767,397,963	100	138,307,923,355	
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	20	1,300,000,000	20	1,600,000,000	20	1,800,000,000	60	4,700,000,000	
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	75	25,138,345,425	75	27,652,179,967	75	30,417,397,963	225	83,207,923,355	
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	11,000,000,000	12	11,500,000,000	12	12,000,000,000	36	34,500,000,000	
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	20	2,041,752,048	20	2245927252,80	20	2470519978,08	60	6758199278,88	
					Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	1,250,000,000	100	1,500,000,000	100	1,750,000,000	100	4,500,000,000	
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1,250,000,000	12	1,500,000,000	12	1,750,000,000	36	4,500,000,000	
					Persentase Biro yang Terlayani Arsip Dinamis	Persen	N/A	100	3,800,000,000	100	3,800,000,000	100	3,800,000,000	100	11,400,000,000	
			01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	3,800,000,000	12	3,800,000,000	12	3,800,000,000	36	11,400,000,000	
		1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Sekretariat Daerah yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	5,714,072,000	100	6,285,479,200	100	6,914,027,120	100	18,913,578,320	
			01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	N/A	12	5,310,540,000	12	5,841,594,000	12	6,425,753,400	36	17,577,887,400	
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	12	403,532,000	12	443,885,200	12	488,273,720	36	1,335,690,920	
		1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Sekretariat Daerah yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	83,300,000,000	100	90,100,000,000	100	98,700,000,000	100	272,100,000,000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Data Capaian Pada Tahun 2023	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG - JAWAB	LOKASI
				INDIKATOR	SATUAN		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	-16
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	8,300,000,000	12	10,100,000,000	12	13,700,000,000	36	32,100,000,000	
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	75,000,000,000	12	80,000,000,000	12	85,000,000,000	36	240,000,000,000	
		1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah yang Dipelihara	Persen	N/A	100	97,908,202,008	100	107,699,022,207	100	117,603,155,196	100	323,210,379,412	
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	N/A	1000	11,331,279,237	1000	12,464,407,160	1000	13,710,847,876	1000	37,506,534,274	
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	20	75,078,012,804	20	82,585,814,084	20	90,093,615,364	20	247,757,442,252	
			010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	23	11,498,909,967	23	12,648,800,963	23	13,798,691,956	23	37,946,402,886	
		1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	34,123,520,058	100	34,123,520,058	100	34,123,520,058	100	102,370,560,174	
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2,239,685,090	2	2,239,685,090	2	2,239,685,090	2	6,719,055,270	
			04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	31,883,834,968	2	31,883,834,968	2	31,883,834,968	2	95,651,504,904	
		1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persen	N/A	100	15,000,000,000	100	16,000,000,000	100	18,000,000,000	100	49,000,000,000	
			03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	N/A	12	15,000,000,000	12	16,000,000,000	12	18,000,000,000	36	49,000,000,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

FUNGSI PENUNJANG PADA SEKRETARIAT DAERAH

Sebagaimana disampaikan dalam bab sebelumnya, setda merupakan unsur staf pendukung kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Secara spesifik, dukungan setda adalah dalam perumusan kebijakan umum daerah provinsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan. Kinerja setda dalam pembangunan juga diperlihatkan dari kontribusinya dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Termasuk di dalamnya pemastian dihasilkannya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkualitas.

Saat ini, upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik sudah memasuki periode kedua. Periode pertama pada kurun waktu perencanaan menengah Tahun 2013-2018 walau tidak dengan istilah reformasi birokrasi. Periode kedua adalah pada kurun waktu perencanaan menengah Tahun 2018-2023 dan telah memunculkan istilah reformasi birokrasi secara jelas. Di dalam perjalanannya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mampu mencapai kategori A atau interpretasi memuaskan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Artinya bahwa upaya yang dilakukan telah dapat menyebabkan perubahan dengan progres yang nyata.

Selanjutnya upaya perbaikan dan peningkatan tersebut akan terus dilakukan sehingga perubahan terjadi secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selalu berada dalam kondisi prima dalam memenuhi hak masyarakat dalam pembangunan. Terlebih dalam konsep reformasi tematik yang digaungkan pemerintah pusat saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus dapat menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola yang telah dilakukan memiliki dampak terhadap peningkatan hasil pembangunan.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang pada Sekretariat Daerah

Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi)					Target Tahun			Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahun		
			2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi General	Poin	80.75	80.83	80.91

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mempedomani RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dimaksud perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Implementasi pencapaian tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya sesuai dengan periode Renstra, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat.
3. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dilakukan dengan tertib dan objektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dan secara periodik kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan terselenggaranya semua program dan ketercapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra, diharapkan dalam 3 (tiga) tahun mendatang akan terbangun tata Kelola pemerintahan yang efektif melalui penerapan reformasi birokrasi tematik dan



general, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



LAMPIRAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN **Dokumen Rencana Strategis (Renstra)**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026

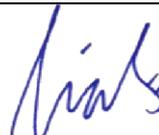
Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan masukan dan usulan dari Biro-biro serta hasil kajian dari Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026, telah dilakukan analisis, pembahasan dan review oleh Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026, yang meliputi:

1. Uraian, analisis maupun kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 mulai dari BAB I Pendahuluan, hingga BAB VIII Penutup;
2. Seluruh data maupun informasi terkait kebijakan, sasaran, termasuk indikator kinerja dan target kinerja telah tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026;
3. Data lainnya yang tercantum dalam tabel, gambar maupun diagram turut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026.

Bahwa berdasarkan analisis, pembahasan dan review tersebut, maka Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini menyatakan menyetujui dan bertanggungjawab atas seluruh isi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 diatas.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 19 Mei 2023
Mengetahui dan menyetujui,

No.	Nama	Jabatan/Biro	Tanda Tangan
1		Kepala Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
2	Rina Mulyana, S.Pd., M.Si	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	
3	Dr. Lia Fitrianingrum, SH., MH	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Hukum dan HAM	

4	Arie Kurnia, S.Pt., M.M	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian	
5	Endah Firliyah, S.Sos	Kepala Bagian Tata Usaha Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	
6	Ir. Iskandar, M.T.	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
7	Winny Citra Dewi Utami, S.Sos., M.Kesos	Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi	
8	Sekarwati, S.E., M.Ak., A.K.C.A.	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	
9	Effi Affianti, S.S	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum	
10	Dr. Nanang Koswara, S.Pd., M.M	Perencana Ahli Madya	